



## PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman [inspektorat.majalengkakab.go.id](http://inspektorat.majalengkakab.go.id) Pos-el [inspektorat@majalengkakab.go.id](mailto:inspektorat@majalengkakab.go.id)

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Perhubungan**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **70.2** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	27.5
b. Pengukuran Kinerja	30	24.9
c. Pelaporan Kinerja	15	7.8
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>70.2</b>
<b>Predikat AKIP</b>		<b>BB</b>

**Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan. Tahun 2024 sebagai berikut:**

### 1.) Perencanaan Kinerja

- 1b. Dokumen perencanaan kurang menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang perlu dicapai
- 1c. Dokumen perencanaan kurang mendukung kinerja yang ingin dicapai

### 2.) Pengukuran Kinerja

1. belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
2. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan
3. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala
4. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

### 3.) Pelaporan Kinerja

1. Dalam dokumen Laporan Kinerja, salah satu indikator tidak dapat menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/provinsi/nasional.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) namun upaya yang akan dilakukan belum komprehensif
3. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
4. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
5. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

### 4.) Evaluasi Internal

4.a.2 Tidak terdapat Rencana Tindak Lanjut LHE AKIP 4.b.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tidak dilaksanakan oleh SDM yang memadai 4.c.1 Seluruh rekomendasi atas hasil Akuntabilitas Kinerja Internal belum di tindaklanjuti 4.c.2 Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP karena TL atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal 4.c.3 Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja (masih ditemukan sebagian kecil belanja-belanja tidak relevan dengan pencapaian kinerja)

## 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

### 1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1b. Lakukan kajian Dokumen perencanaan agar menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang perlu dicapai 1c. Dokumen perencanaan agar dipedomani untuk mewujudkan capaian kinerja

### 2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Membuat dan menetapkan mekanisme yang jelas terkait pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

2. Melakukan penelaahan kembali terhadap data kinerja yang dikumpulkan
3. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala
4. Setiap level organisasi agar melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

### 3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Mengkaji indikator agar dapat menginfokan perbandingan di level kabupaten/provinsi/nasional
2. Membuat upaya perbaikan yang akan dilakukan ditahun selanjutnya dengan lebih komprehensif dan mendalam.
3. Melampirkan laporan kinerja dari pengukuran kinerja per-triwulan.
4. Dilaksanakan evaluasi laporan kinerja secara internal Perangkat Daerah disertai notulensi.
5. Menggunakan rekomendasi LKIP sebagai perbaikan dokumen perencanaan
6. LKIP dijadikan bahan evaluasi dan perubahan budaya organisasi.

### 4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

Kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk : 4.a.2 Membuat dan menetapkan rencana aksi TL LHE AKIP yang relevan dengan rekomendasi LHE AKIP tahun sebelumnya 4.b.3 Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai (SDM yang telah mengikuti bimtek/diklat) 4.c.1 Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil Akuntabilitas Kinerja Internal 4.c.3 Menyesuaikan belanja-belanja yang tidak relevan dengan pencapaian kinerja agar efisien dan efektif

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Perhubungan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Perhubungan. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka